



## Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Sidotopo Wetan

**Nia Eka Safitri**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Indah Murti**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [niaekas19@gmail.com](mailto:niaekas19@gmail.com)

**Abstract.** *The implementation of direct cash assistance from this research took place in Sidotopo Wetan Village, Surabaya. Most of the people have incomes below the income standard. This research uses descriptive qualitative research methods by describing a situation that occurs directly in the field. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and presenting data from previous research. The results of the research show that the implementation of the direct cash assistance policy in Sidotopo Wetan Subdistrict has been implemented quite well and in accordance with the procedures for receiving assistance, although there are still several obstacles to social conflict, such as the wrong target recipients of aid and the community's ineffectiveness in utilizing the direct cash assistance money provided by the government.*

**Keywords :** *Implementation Policy, Direct Cash Assistance, Social Conflict.*

**Abstrak.** Implementasi bantuan langsung tunai dari penelitian ini mengambil semple tempat di Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya. Sebagian besar masyarakatnya memiliki penghasilan dibawah standart penghasilan. Penelitian inni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mendeskripsikan suatu situasi yang terjadi secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan penyajian data dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di Kelurahan Sidotopo Wetan sudah diterapkan cukup baik dan sesuai dengan prosedur penerimaan bantuan, meskipun masih terdapat beberapa hambatan pada konflik sosial, seperti adanya salah sasaran penerima bantuan dan kurang efektifnya masyarakat memanfaatkan uang bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan. Bantuan Langsung Tunai, Konflik Sosial

### LATAR BELAKANG

Permasalahan kemiskinan selalu menjadi topik yang hangat di kalangan masyarakat, permasalahan yang sampai sekarang masih dicari cara penanggulangannya, permasalahan yang selalu menjadi topik pembahasan yang menarik terutamanya pada Kota Surabaya yang padat penduduk. Menurut Amartya Sen (1987) kemiskinan memiliki keterkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Permasalahan kemiskinan akan terus terjadi selama pendapatan, tingkat pendidikan, dan kesehatan masi rendah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang tercantum dalam putusan sidang Mahkamah Konstitusi, berbunyi “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian*

*abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”* artinya nasional negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum.

Tindakan implementasi adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh entitas publik dan swasta dengan harapan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada tahap awal pengambilan keputusan. Peraturan yang dilakukan dalam tindakan nyata dapat dianggap sebagai proses penerapan kebijakan atau implementasi kebijakan, Mazmanian & Sabatier (1983:61). Adapun teori yang mendefinisikan implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut :

Implementasi merupakan sebuah peraturan yang dibuat dan dilakukan oleh individu pemerintah dan individu swasta dengan harapan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam pengambilan keputusan sebelumnya. Secara sederhana implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah langkah-langkah untuk menerapkan peraturan dengan bentuk nyata atau tindakan. Menurut kajian klasik Mazmanian & Sabatier (1983: 61) memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan dapat berupa putusan dari pengadilan, namun juga bisa berupa arahan eksekutif, keputusan, atau keputusan penting yang dibuat oleh badan peradilan. Kesimpulannya bahwa keputusan dapat menentukan dengan tepat maksud atau tujuan yang ingin dicapai, serta beberapa pendekatan untuk menyusun proses penerapan tujuan yang ingin di capai.

Secara garis besar Implementasi menurut (Winarno, 2014:147) kebijakan yang sudah disahkan oleh undang-undang di mana berbagai pihak, kelompok, protokol, dan metode berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan program atau kebijakan. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, penguasa, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta dengan tujuann mencapai tujuan keputusan disebut sebagai implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn(1975:65).

Kalimat kemiskinan dapat diartikan oleh seseorang individu atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan minimal nilai rata kemakmuran ekonomi dari standar hidup tertentu. Mengingat bahwasannya Kota Surabaya adalah kota kedua terbesar

di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, maka perlu perhatian khusus mengenai penanggulangan kemiskinan agar tidak terjadi kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Berdasarkan situs resmi pada Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Kota Surabaya menduduki angka kemiskinan sebesar 4,6% pada tahun 2022 hingga Maret 2023. Sementara itu pemerintah sedang mengupayakan penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 2% di bulan Maret 2024 nantinya. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Sosial Kartu Perlindungan (KPS) yang kini digantikan oleh Kartu Perlindungan Keluarga Sejahtera (KKS), dll hanyalah beberapa inisiatif yang dicanangkan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 ayat 2 tentang program percepatan pengentasan kemiskinan, program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diubah namanya menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Rencana Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2005-2025 mengenai penanggulangan kemiskinan yaitu berencana mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, makmur, mandiri, adil, dan sejahtera agar dapat mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, hal ini sudah tertuang dan di rancang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode tahun 2005 – 2025. Tujuan utamanya sebagai peningkatan pertumbuhan struktur ekonomi yang berdaya saing tinggi untuk membangun sumber daya yang kompetitif dan berkualitas tinggi.

Kelurahan Sidotopo Wetan, Kota Surabaya adalah salah satu daerah yang menerima anggaran pemerintah desa kepada masyarakat yang dapat dikatakan kurang mampu atau kurang sejahtera dalam perekonomiannya, sehingga terdapat pendataan penurunan ekonomi secara signifikan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui website kelurahan, jumlah Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sidotopo Wetan terdapat sejumlah 1.873 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 568. Penyaluran Bantuan Langsung tunai yang diterima oleh masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan sesuai dengan keadaan keluarga, bantuan langsung tunai yang diterima warga mulai dari Rp. 800.000 hingga Rp. 1.200.000 perbulannya. Namun dalam penilaian peneliti, terdapat permasalahan yang terjadi pada implementasi program bantuan langsung tunai tersebut. Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu pada kebutuhan masyarakat yang dirasa masi kurang tertutupi dari bantuan langsung tunai tersebut, permasalahan ini tidak lain dikarenakan gaya hidup masyarakat yang juga berubah seperti mengambil cicilan motor, pembayaran mekkar, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana yang

kurang efektif menjadi masalah bagi masyarakat di Kelurahan Sidotopo Wetan, sedangkan tujuan dari program bantuan langsung tunai tersebut tidak lain adalah untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segi perekonomian untuk kebutuhan pokok. Namun tidak hanya masalah tersebut yang menjadi penghambat, tetapi juga kurangnya pemerataan atau salahnya sasaran penerima bantuan langsung tunai pada perangkat desa (pelaksana kegiatan) di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kota Surabaya.

Rendahnya perekonomian masyarakat di Kelurahan Sidotopo Wetan yang signifikan dianggap menjadi salah satu penurunan perekonomian negara, salah satunya dikarenakan rendahnya pendidikan sehingga susah mencari pekerjaan yang lebih baik yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang dan pangannya. Dengan adanya masalah tersebut pemerintah mencari solusi dengan cara membantu perekonomian masyarakat melalui program bantuan langsung tunai, dampak positifnya masyarakat dapat terbantu mengurangi beban hidupnya. Selain itu juga terdapat sisi negatif dari diadakannya program bantuan langsung tunai yaitu masyarakat yang menerima bantuan menjadi berpangkuh tangan untuk mengandalkan uang bantuan tersebut, mereka juga menjadi malas dan manja untuk bekerja karena lebih memilih untuk menunggu uang bantuan daripada bekerja sendiri, dan kurangnya daya pikir masyarakat yang seharusnya uang bantuan bisa digunakan untuk modal usaha agar uangnya menjadi berkali-kali lipat lebih banyak.

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori memiliki fungsi sebagai landasan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan fakta, maka penulis memanfaatkan beberapa teori untuk mendapatkan penafsiran dalam penelitian yang akan dipahami dengan jelas antara lain yaitu :

### **1) Implementasi Kebijakan Publik**

Teori implementasi secara Etimologis dalam kamus Webster Wahab (2012:135) memiliki pengertian implementasi yaitu memberikan akibat yang sebenarnya (memberi pengaruh atau akibat pada sesuatu); untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut perspektif ini, implementasi mengacu pada proses penerapan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk undang-undang, perintah eksekutif, keputusan presiden, keputusan pengadilan, atau peraturan administrasi.

Menurut Noeng Muhadjir sebagai seorang peneliti terdahulu mengartikan bahwa kebijakan adalah sebuah upaya mengatasi permasalahan sosial demi kebaikan masyarakat sebagai prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial. Terdapat empat tujuan dalam kebijakan antara lainnya; (1) peningkatan taraf hidup masyarakat; (2) penegakan hukum, keadilan sosial,

dan peluang pertumbuhan dan presentasi pribadi; dan (3) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah, perencanaan, pengambilan, keputusan, dan pelaksanaan; (4) memastikan pembangunan keberlanjutan.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2009:494) mencapai tujuan merupakan sebuah prinsip dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terdapat dua langka yang harus sesuai dengan berlandaskan tidak boleh lebih ataupun kurang, langkah diantaranya yaitu langsung mengimplementasikan dalam program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

## **2) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Pramanik(2020) yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Program sosial ini muncul karena sebagai tindakan pemerintah berdasarkan nilai-nilai tertentu untuk mengatasi permasalahan publik dengan memanfaatkan sumber daya seperti masalah kemiskinan. Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah surabaya untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan yang dijalankan antarlain yaitu pemberian subsidi seperti harga bahan bakar yang dinaikkan untuk menghemat anggaran negara akibat kenaikan harga minyak dunia (Iping, 2020).

## **3) Definisi Kemiskinan**

Seseorang atau sekelompok individu yang sulit untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari seperti kebutuhan pokok dalam rumah tangga maka dapat disebut dengan warga miskin atau kemiskinan penduduk, hal ini didefinisikan oleh Faturachman dan Marcelinus Molo dalam (Matana, 2016). Persyaratan penting yang dipertimbangkan mencakup kebutuhan akan keberlanjutan yang sehat, pendidikan berkualitas tinggi, perumahan yang layak, kesehatan yang terjamin, pekerjaan yang terhormat, ketersediaan layanan publik yang berkualitas, dan rasa aman dalam pemikiran masing-masing individu. Artinya bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki banyak segi dan rumit sehingga mengakibatkan berbagai faktor saling berhubungan dan memperkuat. Dengan demikian istilah “miskin” memiliki definisi yang luas. Sehingga kemiskinan perlu ditangani secara serius oleh sejumlah pemangku kepentingan di berbagai bidang. Mengingat tentang perlunya kajian yang menyeluruh mengenai penyebab kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi adalah sebuah poin-poin penting untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan bersama, menurut Larantika dkk(2017). Sedangkan definisi kemiskinan menurut Soekanto adalah suatu keadaan dimana

terdapat disparitas pendapatan dalam jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga berdampak pada kesehatan, pola makan, dan pengambilan keputusan. Kemiskinan muncul akibat bencana alam atau faktor budaya, baik internal maupun eksternal (Handayani, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Dengan metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada penilian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Sidotopo Wetan” tentu saja mengatasi masalah yang terjadi sehingga diperlukan juga pemahaman menyeluruh tentang latar belakang histor dan kontekstual dari masalah yang ada serta kepatuhan organik terhadap jenis data yang paling dapat diandalkan, khususnya data kualitatif. Selama peneliti menggunakan metode kualitatif menggunakan landasan teoritis untuk mendukung data agar dapat berkonsentrasi pada penelitian berbasis fakta yang melibatkan pengamatan terhadap narasumber yang terkait mendapatkan bantuan dan mencoba memahami penilaian mereka terhadap program bantuan langsung tunai yang sudah dijalankan.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini tidak lain untuk mendapatkan informasi terkait Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sidotopo Wetan seccara mendalam dan empiris serta diharapkan dapat mengetahui dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi ketika mengimplementasikan program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kota Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Bantuan Langsung Tunai**

Masalah yang terjadi di lingkungan sosial memiliki akar penyebab yang beragam, karena setiap masalah memiliki penyebab yang berbeda-beda maka sulit juga bagi pemerintah untuk mengidentifikasikannya secara tepat dan komprehensif. Hal ini disebabkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang menjadi sumber konflik malah menjadi akibat dari hal lainnya. Pada dasar contoh ketidakpastian sosial seputar penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sidotopo Wetan sebagai konflik sosial yang terjadi. Konflik sosial tidak dapat dihilangkan dari masyarakat karena merupakan aspek yang melekat pada kehidupan bermasyarakat. Dalam permasalahan sosial akan selalu ada konflik yang terjadi. Oleh karena itu penegak hukum dalam peraturan undang-undang harus menjunjung tinggi kepentingan publik dan tetap fokus. Sehingga proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Untuk penyebab terjadinya konflik sosial adalah tujuan yang beragam dan

bertentangan baik dari instrumen atau distribusi sumber daya yang tidak etis, status masalah, dan pandangan cara memandang antar pihak (Luthan dalam Zulkifli, 2006:24).

Implementasi kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kelurahan Sidotopo Wetan terjadi secara terstruktur dengan pendataan dalam musyawarah desa dengan perwakilan RT dan Rw kepada pihak kelurahan. Kondisi yang dilakukan sesuai dengan petunjuk bahwa yang mendapatkan bantuan langsung tunai adalah warga yang dirasa kurang mampu dan berhak menerima bantuan langsung tunai. Pendataan yang dilakukan oleh RT/RW yang dilakukan survei oleh kader-kader dinas sosial atas persetujuan kepala desa terkait satu keluarga. Proses pengajuan diri kemudian dilanjut dengan seleksi dokumen pengajuan. Data yang sudah sesuai akan dilakukan proses lebih lanjut hingga penentuan jumlah bantuan. Jumlah bantuan yang didapat setiap keluarga disalurkan sesuai kondisi kebutuhan antar individu, penyaluran bantuan langsung tunai tersebut diberikan mulai dari Rp. 800.000,- per bulan hingga Rp. 1.200.000,- per bulan.

Namun juga terjadi konflik kecemburuan sosial terhadap masyarakat yang menerima bantuan dengan orang yang tidak menerima bantuan tersebut. Konflik kecemburuan sosial ini diakibatkan karena terdapat masyarakat yang merasa pembagian bantuan langsung tunai tersebut tidak sesuai dengan kehidupan sebenarnya. Dari jumlah jiwa sebanyak 1.873 jiwa dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 568 ini dirasa adanya tidak tepat sasaran, sehingga perlu adanya pendataan ulang atau survei dengan sebenarnya sesuai kondisi yang ada. Dikarenakan terdapat informasi dari warga bahwasannya ada pihak pendataan yang memberikan data bantuan kepada warga yang dirasa masih mampu, kejadian seperti tidak lain dikarenakan akibat sifat kekeluargaan, sehingga seseorang yang dirasa dekat dengan pendata akan mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Kecemburuan sosial ini membuat masyarakat yang sebenarnya masih tergolong mampu, menjadi dan merasa juga berhak mendapatkan bantuan tersebut.

### **Dampak Adanya Bantuan Langsung Tunai**

Masalah yang terjadi di Kelurahan Sidotopo Wetan cukup efektif dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi akibat rendahnya penghasilan masyarakatnya. Beberapa warga ada yang benar-benar terbantu untuk kebutuhan primernya seperti makananan yang sehat. Terlebih lagi hal yang baik untuk masyarakat yang menggunakan dana bantuan sebagai modal usaha, sehingga masyarakat tersebut dapat memutar uangnya dan menjadikan uang bantuan tersebut menjadi lebih banyak. Namun terdapat pula masyarakat yang tidak menggunakan dana bantuan langsung tunai ini dengan baik, seperti penggunaan dana sebagai gaya hidup yang berlebih untuk mengambil kredit motor, membeli perhiasan, dll tanpa

memikirkan bahwa ada kebutuhan yang seharusnya mereka dahulukan. Dampak negatif lainnya juga terdapat pada masyarakat yang malah berpangkuh tangan untuk menunggu uang bantuan tanpa harus bekerja, mereka merasa tidak perlu bekerja lagi karena merasa kehidupannya sudah terjamin oleh pemerintah melalui bantuan langsung tunai tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang sudah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlu di lakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan pengaruh yang dilakukan. Tujuan utama adanya program bantuan langsung tunai adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di kelurahan sidotopo wetan berjalan sesuai dengan petunjuk penyaluran dan pencairan dana bantuan langsung tunai. Kontribusi bantuan langsung tunai di kelurahan sidotopo wetan surabaya berpengaruh bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, meskipun terdapat beberapa adanya hambatan dalam implemementasi program bantuan langsung tunai di kelurahan sidotopo wetan. Hambatan yang terjadi yaitu adanya salah sasaran penerima bantuan. Penyaluran bantuan langsung tunai yang kurang tepat ini perlu di tindak lanjuti sesuai dengan syarat penerima bantuan langsung tunai tersebut. Kurangnya informasi dan kurangnya perketatan pemenuhan syarat penerima BLT ini menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat. Hambatan lainnya terdapat pada masing-masing individu yang kurang memanfaatkan uang bantuan yang diberikan. Dari aspek implementasi yang dilakukan di kelurahan sidotopo wetan, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai sudah berjalan sesuai dengan tujuan, hal ini dapat diliat peneliti dari pernyataan masyarakat yang menerima bantuan merasakan adanya dampak yang dirasakan semenjak adanya bantuan langsung tunai untuk kebutuhan sehari-hari.

## **SARAN**

1. Kepada pemerintah desa atau aparaturnya yang ikut terjun dalam program bantuan langsung tunai di kelurahan sidotopo wetan agar lebih memperhatikan tahapan dan syarat penerima bantuan langsung tunai yang tepat dan benar benar membutuhkan, agar tidak ada lagi kecemburuan sosial.
2. Untuk penerima bantuan langsung tunai setidaknya mendapatkan sosialisasi untuk dapat memanfaatkan uang tersebut sebagai modal usaha agar menjadikan masyarakat tidak terus bergantung dengan uang bantuan langsung tunai.



3. Untuk mencapai tujuan dengan baik maka perlu adanya tingkat pengawasan langsung oleh pemerintah kelurahan, serta adanya wawancara langsung dengan masyarakat. Memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan aspirasinya melalui layanan terpadu agar mengurangi nepotisme di kelurahan sidotopo wetan surabaya.

## DAFTAR REFERENSI

- Dan, H., Pangan, B., Tunai, N., Meningkatkan, D., Masyarakat, K., Sampul, H., Kasus, S., Implementasi, P., Di, K., Purwodadi, K., Blimbing, K., & Malang, K. (n.d.). KONTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL BPNT DAN PKH TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Fitra Tsania, N., Setiawati, B., & Arfah, S. R. (n.d.). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA LARINGGI KABUPATEN SOPPENG. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Islam, E., Kasus, S., Panaragan, D., Asri, T., Tulang, K., Tengah, B., Tulang, K., & Barat, B. (n.d.). ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM UPAYA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF.
- Khothimah, K., Hertati, D., Nasional, P., Timur, J., Rungkut Madya No, J., Anyar, G., Gunung Anyar, K., & Surabaya, K. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI POLICY EVALUATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM. *GOVERNANSI*, 7, 2549–7138.
- Penyaluran Bantuan Langsung, E., Elly Safitri, R., & Wahyu Pradana, G. (2023). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan).
- putri, N. B. dkk. (2023). EVALUASI+KEBIJAKAN+BANTUAN+LANGSUNG+TUNAI+DANA+DESA+(BLT-DD)+TAHUN+2020-2022+DI+DESA+TOAPAYA+SELATAN+KABUPATEN+BINTAN+KEPULAUAN +RIAU. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3, 2797–0469.
- Ramadhan amanda fadlilah dan n Fransiscus Xaverius Sri Sadewo2. (2021). KELUARGA MISKIN DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID - 19 DI KELURAHAN KARANG KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021.
- Suci Megawati, D. A. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO. *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO*, 10(publika), 175–190.

- Amran. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SECARA MERATA KEPADA MASYARAKAT.
- Bashori, I. , dkk. (n.d.). implementasi blt aceh.
- Djako, P., & Panigoro, M. (2022). PENGARUH PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN MOODU KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO. In Sudirman Pengaruh Pemberian BLT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.... Hlm (Vol. 4, Issue 2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>,
- Fitri, M., Agung Nugraha, A., Taufiq Abadi, M., & Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (n.d.). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) di Pesurungan Kota Tegal (Vol. 1, Issue 2).
- Hasanah, U., Imanuari Pertiwi, V., & Veteran Jawa Timur, U. (2023). Program KALIMASADA Ciptakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan The KALIMASADA Program Creates An Orderly Society For Population Administration. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3). <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1344>
- Kabupaten Kudus, D., & Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S-, U. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2008.
- Prameiswary, A., Tukiman, T., Rungkut, J., No, M., Gunung Anyar, K., & Surabaya, K. (2023). Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kelurahan Genting Kalianak Kota Surabaya Implementation Of Population Administration Service Activities Through The Klampid New Generation Application In Genting Kalianak Village Surabaya City. 1(3), 47–56. <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i3.535>
- Program, D., Sebagai, K., Pengabdian, B., Kepada, M., Di, M., Morokrengan, K., Berliana, E., Masrifah, L., & Hidayat, E. (2023). Pengajuan Akta Kelahiran Anak Melalui Klampid New Generation. 2(2), 2692–8164.
- Unsrat Jl Kampus Bahu Unsrat Manado, F., Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Sekretariat: IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA TOKIN BARU KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN. In *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 1).